



**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI
KE PROVINSI SUMATERA UTARA
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2018 – 2019
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2018.**

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Sumatera Utara adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dewan di bidang pengawasan, khususnya terkait dengan pengawasan dalam hal Kesiapan dan persiapan menghadapi Pemilu 2019. Terhadap Pemda khususnya Dukcapil, KPU dan Bawaslu di Provinsi Sumatera Utara.

Tim Kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara berjumlah 16 orang anggota Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh 2 (dua) Tenaga Ahli dan 4 (empat) orang dari Sekretariat Komisi II DPR RI, dan 1 (satu) orang reporter dari Lembaga Pemberitaan DPR RI serta 1 (satu) orang dari TV Parlemen.

B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Spesifik ini dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 22 februari September 2018 dan telah mengadakan pertemuan di Kantor Pemerintah Daerah Provinsi SUMUT di aula ballroom Beringin Pemda Provinsi SUMUT, bersama Wakil Gubernur sumut dan jajarannya, Kepala dinas Dukcapil Sumut, KPU dan Bawaslu Provinsi Sumut. Komisi II DPR RI diterima oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Beserta Segenap Jajarannya bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara langsung mengadakan pertemuan Rapat.

II. HASIL KUNJUNGAN

A. Hasil yang diperoleh Komisi II DPR RI pada saat kunjungan Kerja Spesifik dalam Rapat sebagai Berikut;

DUKCAPIL PROVINSI SUMATERA UTARA

Perkembangan program KTP elektronik di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan jumlah perekaman dan pencetakan yang dilaksanakan kabupaten/Kota Permasalahan yang dihadapi Kabupaten/Kota dalam perogram KTP elektronik dan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi masalah yang ada sebagai berikut;

PERKEMBANGAN PROGRAM KTP ELEKTRONIK DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Progres pelayanan dan perekaman yang semakin bagus

Kabupaten/Kota sudah melakukan pelayanan dan perekaman keliling

Sarana dan Prasarana yang sudah membutuhkan perawatan / peremajaan

Program KTP elektronik berjalan dengan baik sesuai dengan kondisi SDM, kondisi peralatan dan kondisi jaringan yang ada

Jumlah perekaman dan pencetakan KTP-Elektronik Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2017

JUMLAH PENDUDUK DKB SEMESTER II TAHUN 2017 Sebesar 14,753,286

JUMLAH WAJIB KTP DKB SEMESTER II TAHUN 2017 Sejumlah 10,469,104

PENDUDUK WAJIB KTP YANG SUDAH MELAKUKAN PEREKAMAN Sejumlah 9,160,628

PENDUDUK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN Sejumlah 1,308,476

PENDUDUK BER KTP Sejumlah 7,793,600

PENDUDUK WAJIB KTP YANG BELUM BER KTP Sejumlah 2,675,504

Cakupan perekaman provinsi Sumatera Utara

a. Jumlah Penduduk Tahun 2017 Semester II = **14,753,286**

b. Jumlah Penduduk Tahun 2018 Semester I = 14.838.678

c. Jumlah WKTP Tahun 2017 Semester II = 10.469.104

d. Jumlah WKTP Tahun 2018 Semester I = 10.584.681

e. Jumlah Sudah Rekam Tahun 2017 = 9.160.628

- f. Jumlah Sudah Rekam Tahun 2018 = 9.646.509
- g. Cakupan Perekaman Sampai Tahun 2017 = 87,50
- h. Cakupan Perekaman Sampai Tahun 2018 = 91,14
- i. jumlah penduduk memiliki KTP tahun 2017 = 7.793.600
- j. Jumlah wajib KTP yang belum rekam KTP = 2.675.504

Jumlah Penduduk yang umur 17 Tahun di DP4 (Daftar Pemilih Tetap) se Sumatera Utara Tahun 2018 = 290.970

Jumlah DP4 (Daftar Pemilih Tetap) Se Sumatera Utara Tahun 2018 = 10.537.925

Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Se Sumatera Utara

- a. Wajib KIA Tahun 2016 = 3.847.251
- b. Wajib KIA Tahun 2017 = 4.089.071
- c. Wajib KIA Tahun 2018 = 4.262.710

Cakupan Perekaman KTP-EL DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) Semester I Tahun 2018

- a. Total Penduduk DKB Semester I Tahun 2018 = 14.838.678
- b. Total WKTP (WAJIB KTP) Tahun 2018 Semester I = 10.584.681
- c. Total Wajib KTP yang sudah rekam = 9.646.509
- d. Penduduk yang belum rekam = 938.172
- e. Penduduk yang Memiliki KTP = 8.336.086
- f. Penduduk Wajib KTP yang belum Memiliki KTP = 2.248.595

Permasalahan secara umum yang dihadapi Kabupaten / Kota dalam program KTP elektronik

Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan

Pemanfaatan data yang belum maksimal

Sarana dan prasarana yang terbatas

Anggaran yang terbatas untuk pelayanan Administrasi Kependudukan

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi masalah yang ada sbb;
Meningkatkan kualitas pelayanan dan penerbitan KTP-Elektronik melalui percepatan pelayanan sehari selesai

Melakukan jemput bola di berbagai kantong-kantong pemukiman penduduk yang masih banyak belum melakukan perekaman, melakukan perekaman dan penerbitan KTP-Elektronik diberbagai event tingkat nasional maupun regional

Memperpanjang waktu pelayanan/jam pelayanan dikantor setiap harinya minimal mulai jam 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB

Tetap melaksanakan pelayanan pada hari libur, sabtu, minggu dan hari-hari libur nasional

Terkait dengan penyelesaian pencetakan KTP-Elektronik:

Segera melakukan pencetakan terhadap perekaman yang sudah berstatus Print Ready Record (PRR)

Tidak boleh lagi menerbitkan surat keterangan pengganti KTP-Elektronik bagi perekaman KTP-Elektronik berstatus PRR, serta pengganti KTP-Elektronik rusak maupun hilang

Memperpanjang waktu pelayanan/jam pelayanan dikantor setiap harinya minimal mulai jam 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB

Tetap melaksanakan pelayanan pada hari libur, sabtu, minggu dan hari-hari libur nasional

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara melakukan Monitoring dan Evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan

Monitoring dan Evaluasi Perekaman KTP-Elektronik ke Nias Selatan pada tanggal 5 September 2018

Monitoring dan Evaluasi perekaman KTP-Elektronik ke Kota Sibolga pada tanggal 17 September 2018

Monitoring dan Evaluasi Perekaman KTP-Elektronik ke Nias Utara pada tanggal 6 September 2018

GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (GISA)

Bagi Kabupaten/Kota dan Provinsi yang melaksanakan pencaanangan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), diwajibkan paling lambat awal Desember 2018 seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi telah mencanangkan GISA dalam skala Provinsi

Bagi Kabupaten /Kota dan Provinsi yang telah mencanangkakkn Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan(GISA), wajib segera menindak lanjuti melalui penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan (utamanya KK, KTP-Elektronik dan Akte Kelahiran) sehingga target nasional yang telah dicanangkan akan segera tercapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara melakukan Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pencanaan program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)

Monitoring dan Evaluasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pencanaan program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) ke Nias barat pada tanggal 4 September 2018

Sejauh manakah koordinasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pemutakhiran data 2019, dan Permasalahan yang dihadapi saat Proses Pemutakhiran Data

Koordinasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pemutakhiran data 2019

Menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait tahapan pemilu 2019 (penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT))

Mengikuti dengan seksama dan memberikan data kependudukan yang diperlukan

Memfasilitasi klarifikasi data penduduk

Menindaklanjuti saran KPU dan Bawaslu terhadap percepatan perekaman dan pencetakan KTP-Elektronik bagi penduduk yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Permasalahan yang dihadapi selama proses pemutakhiran data

Data pemilih ganda belum dapat dihapus agar dapat melakukan perekaman ulang

Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum sinkron 100%

Dukungan perangkat desa yang belum maksimal

Pelaporan orang yang meninggal belum sinkron untuk data profil Desa/Kecamatan.

Bentuk dukungan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan pelaksanaan setiap pentahapan pemilu serentak 2019

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara bertekad untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu 2019 yang bermartabat melalui penyediaan data kependudukan yang akurat dan penyelesaian rekam cetak KTP-Elektronik

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara siap mengawal penyediaan dan penyempurnaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang berbasis Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

Terkait Permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara akan menanggapi secara nasional, dalam konteks ini Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara hanya diperkenankan menyampaikan pemutakhiran data, dan tidak diperkenankan menambah, mengurangi maupun mengubah data yang telah diberikan

Akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, Direktorat Jenderal Kependudukan dan pencatatan Sipil

Mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu menggunakan hak akses yang telah diberikan oleh Direktorat jenderal untuk melakukan verifikasi dan validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih bermasalah

Dalam melakukan penyandingan data untuk penyiapan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan Data Konsolidasi Bersih (DKB) dan bukan data pelayanan penduduk

KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

kesiapan KPU Provinsi Sumatera Utara dan jajarannya terkait pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019? Apa saja permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan masing-masing pentahapan sebagai berikut;

KPU Provinsi Sumatera Utara dan jajaran telah melaksanakan kegiatan tahapan persiapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dimulai sejak Agustus 2017 bersamaan dengan tahapan Pemilihan Serentak 2018, antara lain sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pemilu 2019;
- 2) Penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU;
- 3) Pembentukan Badan Adhoc Pemilu 2019;
- 4) Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu;
- 5) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu;
- 6) Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu 2019;
- 7) Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- 8) Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 9) Pencalonan Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara;
- 10) Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu;
- 11) Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- 12) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye oleh Partai Politik dan DPD serta Tim Kampanye Pilpres;
- 13) Menyusun Kebutuhan Pengadaan dan Anggaran Logistik Pemilu 2019;

Perkembangan terakhir terkait dengan data pemilih? Mohon dijabarkan secara kronologis mulai dari dilakukannya sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih yang menjadi basis data sampai ditetapkannya DPT Hasil Perbaikan sebagai berikut;

Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018 tidak melaksanakan Coklit terhadap Daftar Pemilih dari rumah ke rumah, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS Pemilu 2019 berdasarkan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018 ditambah dengan Pemilih

Pemula dalam DP4, melakukan proses penataan TPS dan penyesuaian jumlah TPS dengan jumlah Pemilih paling banyak 300 orang untuk setiap TPS, menetapkan DPS, menyusun DPSHP berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS untuk kemudian ditetapkan menjadi DPT.

Menindaklanjuti hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT Nasional pada tanggal 5 September 2018 berdasarkan masukan Partai Politik dan rekomendasi Bawaslu RI terkait Data Ganda dan perbaikan elemen data maka dilakukan penyempurnaan DPT selama 10 hari sejak tanggal 6 s.d 15 September 2018, Upaya –upaya penyempurnaan DPT yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota antara lain menganalisis data ganda, self asesment data ganda, verifikasi faktual kegandaan data, rapat koordinasi dengan Bawaslu, Partai Politik dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Pada tanggal 16 September 2018 telah dilaksanakan rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan tersebut di tingkat nasional. Pada rapat pleno DPT Hasil Perbaikan dan kembali mendapat rekomendasi Bawaslu RI dan masukan partai politik untuk melakukan pencermatan kembali terhadap data ganda, perbaikan elemen data, pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat selama 60 Hari kedepan untuk di rekapitulasi kembali menjadi DPT Hasil Perbaikan kedua.

Rincian hasil rekapitulasi DPS, DPT, DPTHP Pemilu 2019 sebagai berikut :

URAIAN	DPS 20 Juni 2018	DPT 31 Agustus 2018	DPTHP I 14 September 2018
Jumlah TPS	41.394	41.992	41.990
Jumlah Pemilih LK	4.598.148	4.667.956	4.644.553
Jumlah Pemilih PR	4.673.388	4.758.264	4.733.581
Total Pemilih	9.271.536	9.426.220	9.378.134

Hasil rekapitulasi data pemilih di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara setelah ditetapkannya DPT Hasil Perbaikan secara Nasional?

Dan sejauh manakah perubahan/perbaikan yang dilakukan berdampak pada logistik Pemilu (misalnya terkait perubahan jumlah TPS, dan lain-lain) sebagai berikut;

- a) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan berkurang pada masing-masing Kabupaten/Kota;
- b) Perubahan jumlah TPS ; pengurangan TPS Kabupaten Karo sebanyak 4 TPS yaitu pada Kecamatan Berastagi berkurang 3 TPS dan Kecamatan Kabanjahe berkurang 1 TPS ; Penambahan TPS Kabupaten Deli Serdang yaitu membuat TPS baru pada Lapas Pancur Batu yang sebelumnya tidak ada TPS, menambah TPS baru sesuai rekomendasi panwascam di desa Pagar Merbau dikarenakan konflik batas desa dan lokasi TPS jauh dari Desa Induk;
- c) Kebutuhan logistik berdasarkan jumlah DPT, pengurangan/penambahan jumlah DPT setelah adanya perbaikan akan disesuaikan/adendum kebutuhan logistik Pemilu;

Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Bawaslu Sumatera Utara dan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan agar setiap warga masyarakat tidak terkendala dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 sebagai Berikut;

- a) Dalam rangka upaya pemutakhiran data semakin berkualitas dan untuk menunjang efektifitas proses penyusunan daftar pemilih, KPU Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih terdiri atas Bawaslu Provinsi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi, Kemenkumham, BP3TKI, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, PPUA PENCA.
- b) Dalam rangka upaya memastikan setiap warga masyarakat tidak terkendala menggunakan hak pilihnya, KPU Provinsi secara intens melakukan koordinasi bersama Bawaslu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu dengan mengikutsertakan dalam kegiatan Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih antara lain Rapat Koordinasi, Monitoring dan Supervisi, Verifikasi Faktual, rapat sinkronisasi dan persiapan rekapitulasi daftar pemilih, Sosialisasi, dan rapat pleno terbuka.
- c) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga merupakan bagian anggota kelompok kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019;

BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA

PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

Personil jajaran Pengawas Pemilu (Bawaslu Kab/kota telah permanen)

Penguatan Kelembagaan (Peningkatan Kapasitas Melalui Bimtek, Rakor, Rakernis, Konsolidasi, Supervisi/Monitoring)

Strategi Pengawasan

STRATEGI PENGAWASAN

Pengawasan Partisipatif yaitu Kordinasi dengan Stakeholder dan Sosialisasi Pengawasan Pemilu

Strategi Tata Laksana yaitu Perbawaslu, juknis, SE dan Pengelolaan Data hasil Pengawasan

Pengawasan Tahapan yaitu Waskat di setiap Tahapan.

Penanganan Pelanggaran, yaitu Proses Penerimaan Laporan dan Hasil kajian pelanggaran di bawaslu Provinsi/Bawaslu kab/kota (system Picket)

Penyelesaian Sengketa Pemilihan, yaitu Proses Sengketa Pemilu 2019

Sentra Gakkumdu,yaitu Penempatan Personil Penyidik dan Jaksa penuntut dalam Sentra Gakkumdu secara Permanen dalam sekretaris Pengawas Pemilu dan Sosialisasi SOP Sentra gakkumdu secara massif dan intensif kepada Seluruh jajaran Sentra Gakkumdu di tingkat Provinsi dan Kab/kota.

PENGAWASAN TAHAPAN

Bawaslu Prov. Sumatera utara dan Bawaslu kab/kota melakukan pengawasan setiap tahapan 2019 yaitu;

Pengawasan daftar Pemilih melalui waskat di setiap tahapan

Pengawasan Pencalonan yakni Pengajuan Daftar Bacaleg hingga Penetapan DCT.

Pengawasan Kampanye yaitu Kampanye yang dilakukan diluar jadwal, Kampanye citra diri parpol, penyebaran APK, dll.

Penyelesaian Sidang Sengketa Proses Pemilu Baik di Provinsi maupun Kab/kota (mediasi PSI dan Calon DPD dan Sidang adjudikasi Partai Berkarya di Provinsi, Mediasi di Kab. Serdang bedagai, Sidang adjudikasi di Kab. Nias Selatan)

PENGAWASAN DATA PEMILIH

Pada saat Penetapan DCT Tingkat Provinsi, Bawaslu Sumatera Utara merekomendasikan dimasukkannya 10 nama di DPT kota medan serta Rekomendasi Bawaslu Kab. Nias Selatan untuk menunda Penetapan DPT tanggal 21 Agustus 2018 dikarenakan adanya temuan pengawas pemilu di 3kecamatan di kab. Nias Selatan untuk dilakukan verfak

Pasca Rekapitulasi Daftar pemilih tingkat nasional tanggal 5 september 2018, dan sesuai intruksi Bawaslu RI, Bawaslu kab/kota melakukan pencermatan terhadap DPT HP terkait Data Ganda, Pemilih TMS, Informasi Pemilih invalid, Pemilih yang belum perekaman.

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kab/kota melakukan penyisiran terhadap data ganda by name by address dengan elemen NIK, nama dan tanggal lahir, kemudian direkomendasikan untuk dicermati bersama KPU dan Parpol untuk dilakukan Penghapusan.

SENTRA GAKKUMDU

Koordinasi Bawaslu dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam sentra Gakkumdu berjalan baik.

Penempatan personil Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut dalam Sentra Gakkumdu secara permanen.

Dilakukan Rapat Rutin dalam Sentra Gakkumdu.

Pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai SOP.

III. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terimakasih.